

**PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO  
DAN REALISASI APBN  
SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2009**

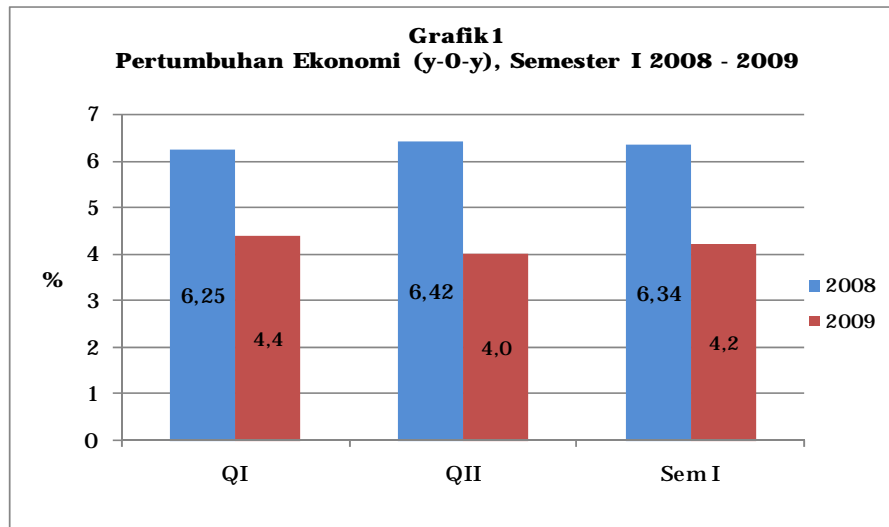
**I. ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO**

**1. Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam UU APBN 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan sebesar 6,0%. Dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, target pertumbuhan ekonomi dikoreksi menjadi 4,5%, dan APBN-P 2009 target tersebut dikoreksi lagi menjadi 4,3%.

Pada triwulan I 2009, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,4%, sedangkan dalam triwulan II pertumbuhan ekonomi mencapai 4,0%. Dengan demikian, dalam semester I 2009 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,2%, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi semester I 2008 yang mencapai 6,34 %.

Pertumbuhan ekonomi semester I 2009 tersebut bersumber dari konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat, dan investasi, yang masing-masing mencapai sebesar 18,0%, 5,4%, dan 3,0%. Sedangkan ekspor dan impor mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 17,2% dan minus 24,9%.



**2. Inflasi**

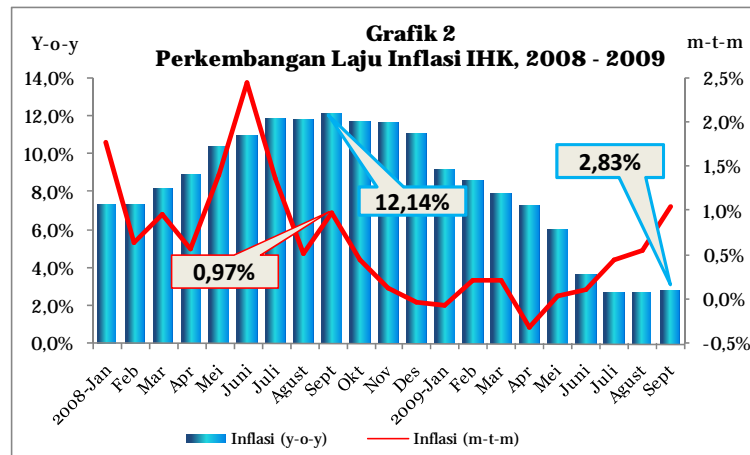
Dalam UU APBN 2009, laju inflasi diperkirakan sebesar 6,2%, kemudian disesuaikan menjadi 6,0% dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, dan menjadi 4,5% dalam APBN-P 2009.

Dari Januari hingga September 2009, laju inflasi kumulatif sebesar 2,28% (y-t-d), inflasi September 2009 terhadap September 2008 sebesar 2,83% (y-o-y), dan inflasi pada bulan September 2009 sebesar 1,05% (m-t-m).

Secara tahunan, laju inflasi September 2009 lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 12,14 %. Hal ini disebabkan karena pada periode yang sama tahun 2008 tersebut terjadi

lonjakan kenaikan harga minyak dunia sehingga menyebabkan harga-harga komoditi primer pun meningkat.

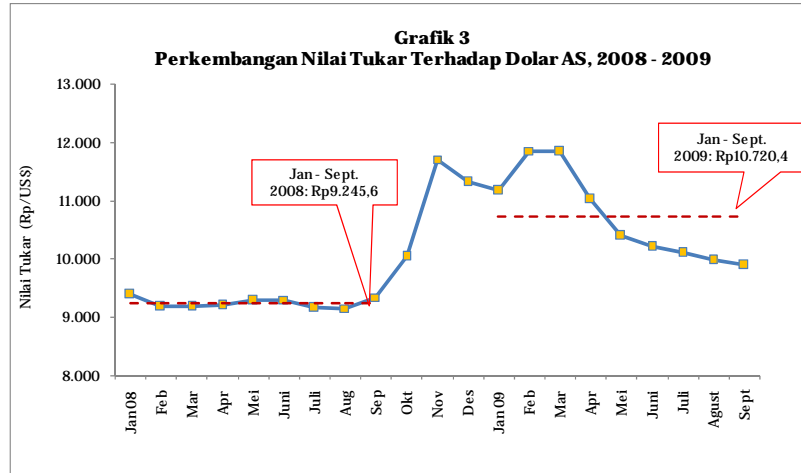
Sedangkan secara bulanan, laju inflasi September 2009 meningkat jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2008 yang mencapai 0,97%. Namun demikian inflasi tahun kalender 2009 (y-t-d) lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi dalam periode yang sama tahun 2008 yang mencapai 10,47 %. Peningkatan inflasi pada bulan September 2009 tersebut terutama didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok sandang, dan kelompok bahan makanan karena naiknya permintaan pada kelompok tersebut dalam menghadapi hari raya Iedul Fitri 1430 H.



### 3. Nilai Tukar Rupiah

Dalam UU APBN 2009, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan sebesar Rp9.400/US\$, yang kemudian disesuaikan dalam Dokumen Stimulus menjadi Rp11.000/US\$, dan dikoreksi menjadi Rp10.500/US\$ dalam APBN-P 2009.

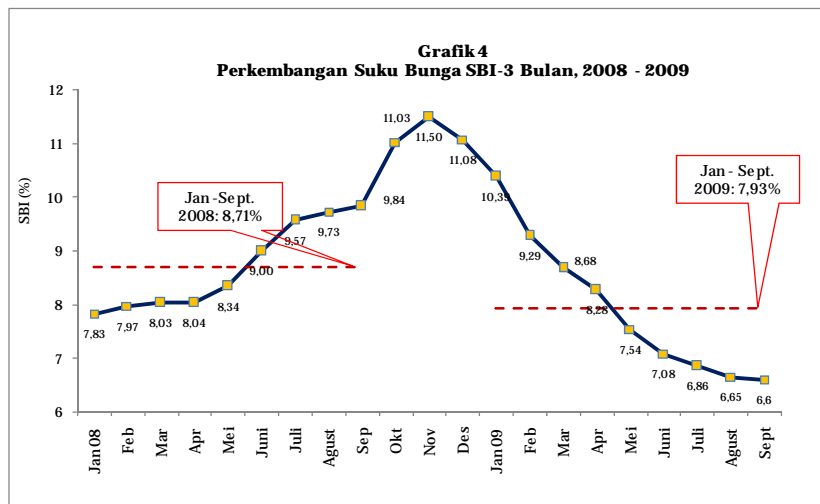
Dalam bulan Januari sampai dengan September tahun 2009, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai rata-rata Rp10.720 per US\$, atau melemah jika dibandingkan dengan rata-ratanya dalam periode yang sama tahun 2008 yang mencapai Rp9.245 per US\$. Namun demikian rata-rata nilai tukar rupiah pada bulan September 2009 menguat menjadi Rp9.901 per US\$, jika dibandingkan dengan rata-ratanya pada bulan sebelumnya yang mencapai Rp9.978 per US\$. Penguatan nilai tukar rupiah ini disebabkan antara lain karena adanya aliran modal asing yang terus berlangsung ke pasar domestik, sehingga mendukung pasokan valuta asing di pasar uang.



#### 4. Suku bunga SBI 3 bulan

Dalam UU APBN 2009 dan dalam Dokumen Stimulus serta dalam APBN-P 2009, suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan sebesar 7,5%.

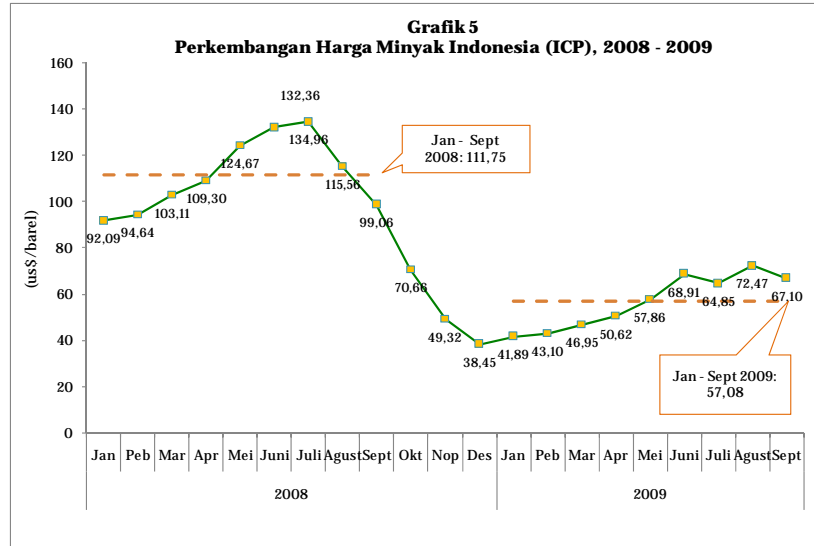
Selama bulan Januari sampai dengan September 2009 realisasi rata-rata SBI 3 bulan mencapai 7,9%, yang berarti menurun dibandingkan realisasinya selama bulan Januari sampai dengan September 2008 yang mencapai rata-rata 8,6%.



#### 5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP)

Dalam UU APBN 2009, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan US\$80,0 per barel. Dalam Dokumen Stimulus, asumsi harga minyak dikoreksi menjadi US\$45 per barel, tetapi kemudian disesuaikan kembali menjadi US\$61 per barel dalam APBN-P 2009.

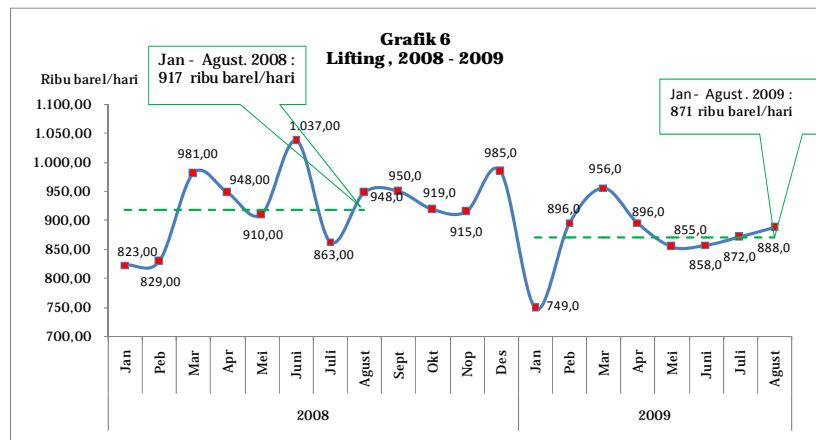
Realisasi ICP selama bulan Januari sampai dengan September 2009 mencapai sebesar US\$57,08 per barel, menurun dari realisasinya dalam bulan Januari sampai dengan September 2008 yang mencapai US\$111,75/barel.



## 6. *Lifting* minyak mentah

Dalam UU APBN 2009, Dokumen Stimulus 2009, dan APBN-P 2009, *lifting* minyak diasumsikan sebesar 0,960 juta barel per hari.

Pada Januari-Agustus 2009 rata-rata realisasi *lifting* minyak mencapai 0,871 juta barel per hari, yang berarti lebih rendah dibandingkan realisasi Januari-Agustus 2008 yang mencapai 0,917 juta barel per hari.



## II. REALISASI APBN

### 1. Pendapatan Negara dan Hibah

Dalam UU APBN 2009, pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp985,7 triliun. Target tersebut direvisi menjadi Rp848,6 triliun dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, dan menjadi Rp871,0 triliun dalam APBN-P 2009.

Sampai dengan 30 September 2009, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp563,6 triliun (64,7% dari targetnya dalam APBN-P 2009). Apabila

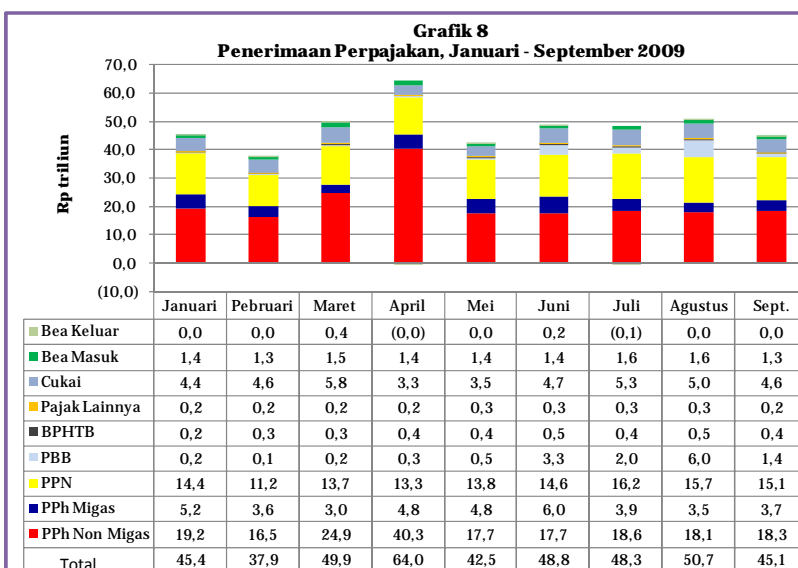
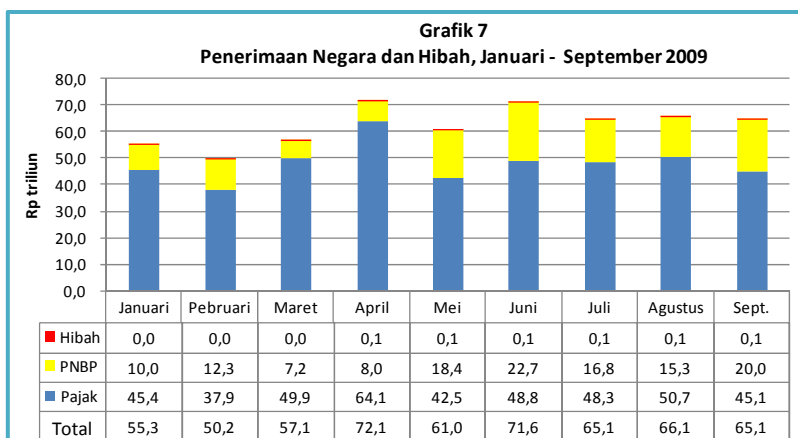
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 yang mencapai 77,2% dari targetnya dalam APBN-P 2008, realisasi tersebut berarti lebih rendah 12,5%.

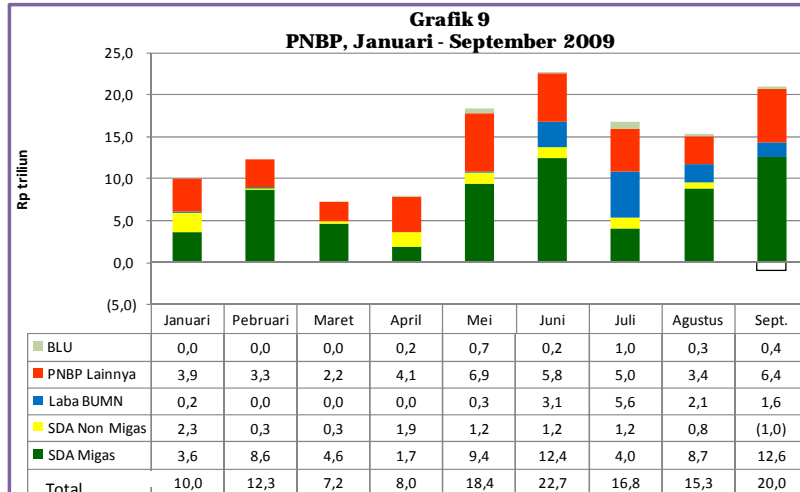
Realisasi pendapatan negara dan hibah terdiri atas realisasi penerimaan dalam negeri Rp563,1 triliun (66,3% dari targetnya dalam APBN-P 2009), dan realisasi hibah Rp0,4 triliun (42,8% dari targetnya dalam APBN-P 2009).

Realisasi penerimaan dalam negeri tersebut terdiri atas realisasi penerimaan perpajakan Rp432,5 triliun (66,3% dari targetnya dalam APBN-P 2009) dan realisasi PNBPNP Rp130,6 triliun (59,9% dari targetnya dalam APBN-P 2009).

Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan 30 September 2009 terdiri dari PPh sebesar Rp230,0 triliun (53,2%), PPN sebesar Rp128,0 triliun (29,6%), PBB dan BPHTB sebesar Rp17,7 triliun (4,1%), cukai sebesar Rp41,2 triliun (9,5%), Bea masuk dan bea keluar sebesar Rp13,5 triliun (3,1%), serta pajak lainnya sebesar Rp2,2 triliun (0,5%).

Sementara itu, realisasi PNBPNP sampai dengan 30 September 2009 terdiri dari penerimaan SDA Rp73,9 triliun (56,6%), Laba BUMN Rp12,9 triliun (9,9%), PNBPNP lainnya Rp41,0 triliun (31,4%), dan BLU sebesar Rp2,7 triliun (2,1%).





## 2. Belanja Negara

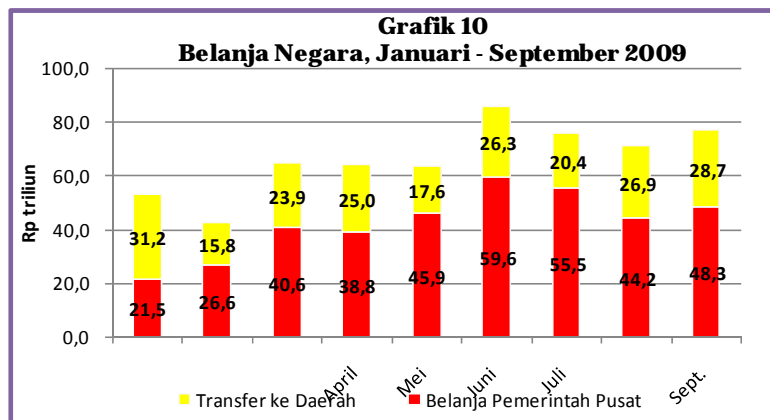
Dalam UU APBN 2009, belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.037,1 triliun, yang kemudian disesuaikan menjadi Rp988,1 triliun dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, dan menjadi Rp1.000,8 triliun dalam APBN-P 2009.

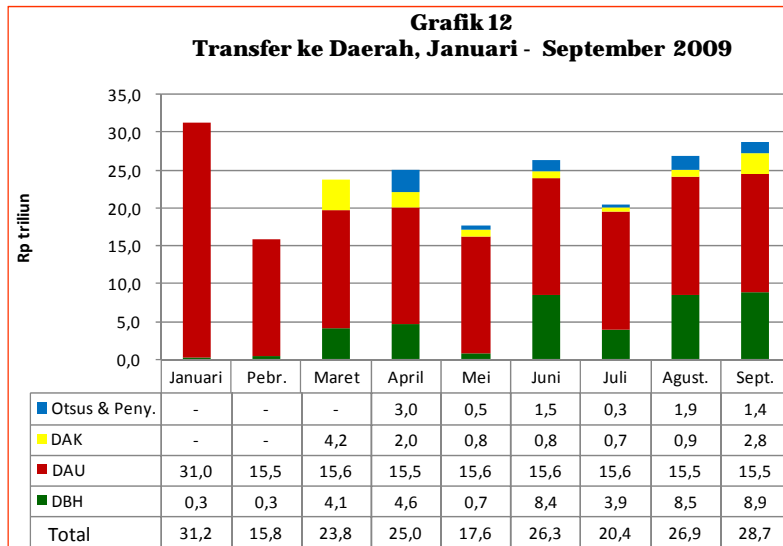
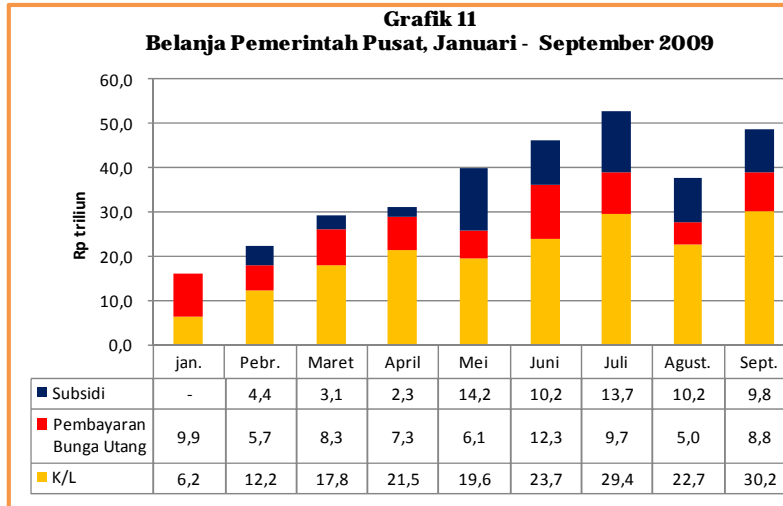
Sampai dengan 30 September 2009, realisasi belanja negara mencapai Rp596,8 triliun (59,6% dari pagunya dalam APBN-P 2009). Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2008 yang mencapai 66,6% dari pagunya dalam APBN-P 2008, realisasi tersebut berarti 7,0% lebih rendah.

Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat Rp381,0 triliun (55,1% dari pagunya dalam APBN-P 2009) dan transfer ke daerah Rp215,8 triliun (69,8% dari targetnya dalam APBN-P 2009).

Realisasi belanja pemerintah pusat didominasi antara lain oleh belanja pegawai Rp99,9 triliun (26,2%), pembayaran bunga utang Rp73,0 triliun (19,2%), subsidi Rp67,9 triliun (17,8%) dan lainnya 36,8%.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah sebagian besar berasal dari DAU Rp155,3 triliun (72,0%) dan DBH Rp39,7 triliun (18,4%).

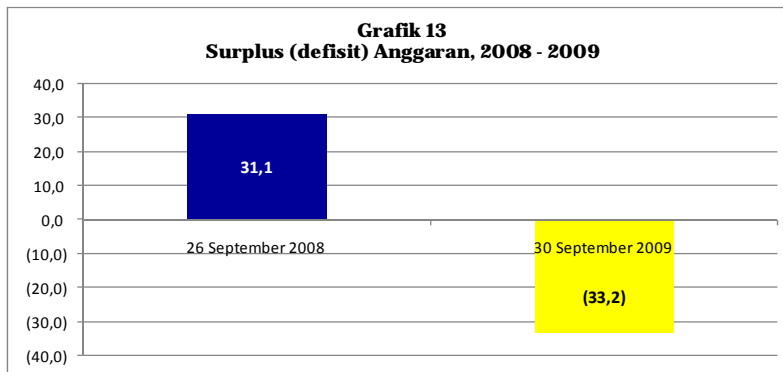




### 3. Defisit Anggaran

Dengan realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp563,6 triliun, dan realisasi belanja negara mencapai Rp596,8 triliun, sampai dengan 30 September 2009 terdapat defisit anggaran Rp33,2 triliun (0,6 % terhadap PDB).

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2008 yang mencapai surplus sebesar Rp31,1 triliun (0,7 % terhadap PDB), kinerja APBN 2009 hingga 30 September 2009 berarti lebih baik penyerapannya.



#### 4. Pembiayaan Anggaran

Dalam UU APBN 2009, pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp51,3 triliun, yang kemudian disesuaikan menjadi Rp139,5 triliun dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, dan menjadi Rp129,8 triliun dalam APBN-P 2009.

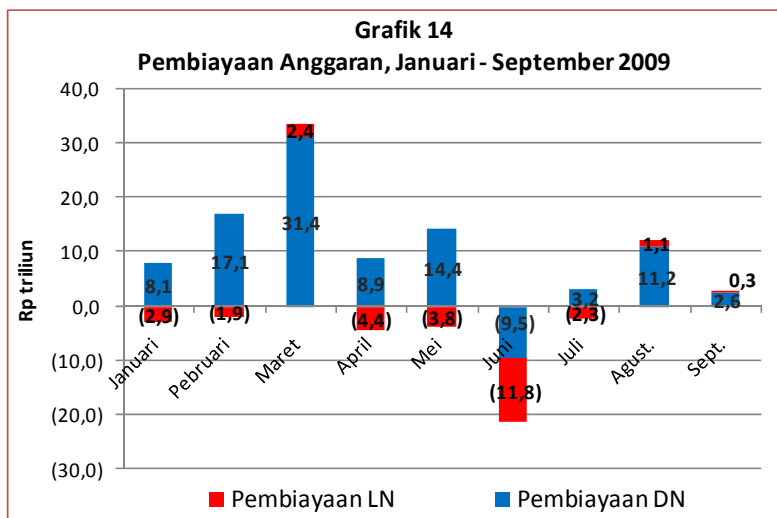
Realisasi pembiayaan hingga 30 September 2009 mencapai Rp63,8 triliun (49,1% dari targetnya dalam APBN-P 2009).

Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2008, realisasi tersebut berarti lebih rendah 34,1%.

Realisasi pembiayaan anggaran tersebut terdiri atas realisasi pembiayaan dalam negeri Rp87,1 triliun (61,1% dari targetnya dalam APBN-P 2009) dan realisasi pembiayaan luar negeri (neto) negatif Rp23,3 triliun (183,2% dari targetnya dalam APBN-P 2009).

Realisasi pembiayaan dalam negeri sebagian besar berasal dari SBN (neto) sebesar Rp85,5 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan luar negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp26,3 triliun; penerusan pinjaman sebesar negatif Rp4,7 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang LN sebesar negatif Rp45,0 triliun.

Dengan realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp63,8 triliun, sedangkan defisit anggaran mencapai Rp33,2 triliun, sampai dengan 30 September 2009 terdapat kelebihan pembiayaan anggaran Rp30,6 triliun. Pada 30 September 2008, kelebihan pembiayaan tersebut mencapai Rp109,8 triliun.



**REALISASI S.D 30 SEPTEMBER , 2008 - 2009**  
(trillion rupiah)

	2008				2009		
	APBN-P	LKPP (Audited)	Realisasi s.d 26 September	% thd APBN-P	APBN-P	Realisasi s.d 30 September	% thd APBN-P
<b>A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>	<b>895,0</b>	<b>981,6</b>	<b>690,6</b>	<b>77,2</b>	<b>871,0</b>	<b>563,6</b>	<b>64,7</b>
<b>I. PENERIMAAN DALAM NEGERI</b>	<b>892,0</b>	<b>979,3</b>	<b>689,7</b>	<b>77,3</b>	<b>870,0</b>	<b>563,1</b>	<b>64,7</b>
<b>1. PENERIMAAN PERPAJAKAN</b>	<b>609,2</b>	<b>658,7</b>	<b>480,7</b>	<b>78,9</b>	<b>652,0</b>	<b>432,5</b>	<b>66,3</b>
a. Pajak Dalam Negeri	580,2	622,4	451,3	77,8	631,9	419,0	66,3
b. Pajak Perdagangan Internasional	29,0	36,3	29,3	101,3	20,0	13,5	67,4
<b>2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>282,8</b>	<b>320,6</b>	<b>209,0</b>	<b>73,9</b>	<b>218,0</b>	<b>130,6</b>	<b>59,9</b>
a. Penerimaan SDA	192,8	224,5	153,6	79,7	138,7	73,9	53,3
b. Bagian Laba BUMN	31,2	29,1	14,4	46,0	28,6	12,9	45,0
c. PNBPN Lainnya	58,8	63,3	41,1	69,9	44,9	41,0	91,5
d. Pendapatan BLU	0,0	3,7	0,0	0,0	5,9	2,7	46,5
<b>II. HIBAH</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>0,9</b>	<b>30,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,4</b>	<b>42,8</b>
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>989,5</b>	<b>985,7</b>	<b>659,5</b>	<b>66,6</b>	<b>1.000,8</b>	<b>596,8</b>	<b>59,6</b>
<b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>697,1</b>	<b>693,4</b>	<b>447,8</b>	<b>64,2</b>	<b>691,5</b>	<b>381,0</b>	<b>55,1</b>
1. Belanja K/L	290,0	259,7	148,0	51,0	314,7	198,8	63,2
2. Belanja Non K/L	407,0	433,7	299,8	73,7	376,8	182,2	48,4
<b>II. TRANSFER KE DAERAH</b>	<b>292,4</b>	<b>292,4</b>	<b>211,6</b>	<b>72,4</b>	<b>309,3</b>	<b>215,8</b>	<b>69,8</b>
1. Dana Perimbangan	278,4	278,7	203,4	73,0	285,1	207,3	72,7
2. Dana Otonomi Khusus dan Peny.	14,0	13,7	8,3	59,0	24,3	8,6	35,3
<b>C. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)</b>	<b>(94,5)</b>	<b>(4,1)</b>	<b>31,1</b>	<b>-</b>	<b>(129,8)</b>	<b>(33,2)</b>	<b>-</b>
<i>% deficit to GDP</i>	<i>(2,1)</i>	<i>(0,1)</i>			<i>(2,4)</i>		
<b>D. PEMBIAYAAN</b>	<b>94,5</b>	<b>84,1</b>	<b>78,7</b>	<b>83,3</b>	<b>129,8</b>	<b>63,8</b>	<b>49,1</b>
<b>I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>	<b>107,6</b>	<b>102,5</b>	<b>101,5</b>	<b>94,3</b>	<b>142,6</b>	<b>87,1</b>	<b>61,1</b>
1. Perbankan dalam negeri	(11,7)	16,2	(1,7)	14,7	56,6	1,5	2,7
2. Non-perbankan dalam negeri	119,3	86,3	103,2	86,5	86,0	85,6	99,5
<b>II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)</b>	<b>(13,1)</b>	<b>(18,4)</b>	<b>(22,8)</b>	<b>173,8</b>	<b>(12,7)</b>	<b>(23,3)</b>	<b>183,2</b>
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	48,1	50,2	14,9	31,0	69,3	26,3	38,0
2. Penerusan Pinjaman	0,0	(5,2)	0,0	0,0	(13,0)	(4,7)	36,0
3. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN	(61,3)	(63,4)	(37,7)	61,6	(69,0)	(45,0)	65,1
<b>KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>109,8</b>		<b>0,0</b>	<b>30,6</b>	